

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Setelah menganalisa pertanyaan penelitian yang ada, penulis akan menyimpulkan berbagai data yang ada dengan ringkas, dilanjutkan dengan saran dari penulis yang sekiranya dapat berguna bagi Kemlu dan pihak terkait dalam terus berupaya menaikkan jumlah pasukan perdamaian perempuan agar dapat terus tercipta kondisi damai di seluruh dunia.

Indonesia adalah salah satu negara yang secara aktif mengirimkan pasukan perdamaian dalam operasi perdamaian yang dimandatkan oleh PBB. Dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia yang dimuat dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 yaitu perdamaian dunia, Indonesia menjadikan *peacekeeping* sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peran perempuan dalam proses perdamaian. Pasukan perdamaian perempuan memiliki peran yang tidak kalah penting dari kolega laki-laki mereka.

Peran mereka dalam negara berkonflik seperti; mewawancarai korban kekerasan dan mengatasi isu di daerah tersebut, berinteraksi dengan perempuan yang komunitasnya melarang berbicara dengan lawan jenis, dan menjadi panutan (*role model*) bagi perempuan di negara tersebut. Ditambah lagi, keberadaan pasukan perdamaian perempuan dinilai lebih akan diterima oleh komunitas dibanding pasukan perdamaian laki-laki. Meskipun peran pasukan perdamaian

sangat penting, namun jumlahnya dari dahulu sampai saat ini masih belum seimbang. Jumlah pasukan perdamaian laki-laki masih terus mendominasi Operasi Perdamaian PBB dari tahun ke tahun dibanding pasukan perdamaian perempuan, meskipun memiliki peran yang penting. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu pandangan bahwa perempuan “tidak pantas” untuk bekerja dalam bidang keamanan yang didominasi laki-laki dan pernah terjadinya pelecehan seksual terhadap pasukan perdamaian perempuan yang sedang menjalankan misi perdamaian di negara berkonflik, yang membuat anggota perempuan menjadi *enggan* untuk menjadi pasukan perdamaian perempuan. Di Indonesia sendiri, pasukan perdamaian perempuan yang akan dikirimkan ke operasi perdamaian perlu mendapatkan izin dari suami/keluarganya, sementara kondisi ini tidak perlu dilalui oleh pasukan perdamaian laki-laki, inilah yang disebut oleh Kemlu sebagai hambatan sosial budaya.

Karena peran pasukan perdamaian perempuan yang tidak tergantikan dalam upaya mencapai perdamaian ini, maka pemerintah Indonesia berkomitmen untuk selalu menaikkan peran perempuan dalam proses perdamaian, salah satunya adalah pasukan perdamaian perempuan yang dikirimkan ke Operasi Perdamaian PBB, sesuai dengan komitmen Indonesia yang telah mengadopsi Resolusi DK PBB nomer 1325 mengenai WPS. Kementerian Luar Negeri Indonesia merupakan salah satu lembaga Indonesia yang menjalankan upaya Resolusi 1325 dalam kebijakannya, serta menjadikan agenda tersebut menjadi salah satu prioritas untuk diimplementasikan.

Selama kepemimpinan Menlu Retno Marsudi, beliau selalu menekankan pentingnya peran perempuan dan bagaimana Indonesia terus berkomitmen untuk menaikkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian di segala kesempatan yang ada. *“Investing in women equals investing in peace,”* merupakan kalimat yang sering diutarakan oleh Menlu Retno di berbagai kesempatan untuk mendorong berbagai negara dan lembaga dalam menaikkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, salah satunya yaitu menambah jumlah pasukan perdamaian perempuan. Oleh karena Kemlu menjadi salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki prioritas untuk menambah partisipasi pasukan perdamaian perempuan dalam Operasi Perdamaian PBB, dan menjadikan hal tersebut sebagai instrumen dalam mencapai perdamaian dunia, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah ***“Bagaimana Upaya-Upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menambah Jumlah Anggota Pasukan Perdamaian Perempuan?”*** yang memiliki batasan masalah dari Agustus 2015-Agustus 2020.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan, penulis menggunakan beberapa konsep untuk menganalisis, yaitu kepentingan nasional, pengarusutamaan gender, dan diplomasi. Konsep pertama yang digunakan adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional telah menjadi sesuatu yang digunakan oleh sebuah negara untuk menekankan aspirasi dan tujuan dari negara yang berdaulat dalam suatu negara. Sebuah negara berpartisipasi dalam *peacekeeping*, karena merasa memiliki obligasi untuk menjaga perdamaian internasional serta menjalankan norma dan nilai internasional. Karena ingin selalu menjaga sistem internasional, banyak negara *middle-power* akan lebih banyak melakukan aktivitas

multilateral, salah satunya adalah berkontribusi dalam Operasi Perdamaian PBB. Salah satu negara *middle-power* yang aktif berkontribusi dalam operasi perdamaian adalah Indonesia.

Pengarusutamaan gender merupakan konsep yang menjadi salah satu pendekatan modern terhadap kesetaraan gender. Pendekatan ini mencoba untuk menginstitutionaliskan kesetaraan gender dengan menciptakan struktur, proses, lingkungan, dan pembuatan kebijakan yang lebih gender sensitif. Dewasa ini, telah banyak negara yang mengimplementasikan PUG dalam departemen atau unit kenegaraannya. Di Indonesia sendiri, PUG telah dilakukan dalam lingkungan Kemlu dan juga dalam pembuatan kebijakannya. Model PUG dibagi menjadi dua, yaitu *technocratic*, dimana institusi pemerintah/birokrat yang menjadi aktor utama dari pengarusutamaan ini, dan yang kedua ada *participatory*, dimana adanya peran individu atau organisasi yang dapat menyuarakan pandangannya terhadap suatu kebijakan pemerintah.

Konsep ketiga yang penulis gunakan untuk menganalisa pertanyaan penelitian ini adalah konsep diplomasi. Diplomasi sering digunakan sebuah negara untuk mendapatkan kepentingan nasional mereka. Diplomasi dilakukan dengan bertukar informasi antar dua atau lebih negara dengan tujuan mempersuasi pihak lain untuk mengubah atau memulai sebuah perilaku suatu negara. Upaya diplomasi ini seringkali dilakukan oleh Kemlu demi mendapatkan kepentingan nasional Indonesia, salah satunya yaitu menambah jumlah partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, dalam konteks ini pasukan perdamaian perempuan.

Dari hasil penelitian penulis yang didapatkan melalui sumber buku/jurnal dan juga wawancara dengan beberapa narasumber terkait, Kemlu telah melakukan beberapa upaya dalam menaikkan jumlah pasukan perdamaian perempuan. Upaya ini menjadi salah satu pengimplementasian PUG dengan model *technocratic* dalam Kemlu, dengan menciptakan kebijakan dan agenda yang memiliki fokus terhadap perempuan dan perdamaian. Upaya Kemlu memiliki tidak hanya meliputi ranah domestik saja, namun juga regional dan internasional.

Dalam ranah domestik, Kemlu terus mendorong agenda WPS dalam TKMPP, terlebih kepada lembaga TNI dan Polri yang menjadi aktor utama yang menyumbang pasukan perdamaian perempuan. Menlu Retno Marsudi tidak henti-hentinya menggaungkan komitmen Indonesia terhadap agenda ini, dan bagaimana Indonesia dapat menjadi *role model* bagi negara lain apabila berhasil menjalankan komitmen ini. Komitmen ini pun diterima dengan baik oleh kedua belah pihak dan mereka sendiri sudah memiliki komitmen tersendiri terhadap agenda terkait. Kedua adalah membuat *Roadmap Vision 4000 Peacekeepers* yang memuat strategi Indonesia untuk mengirimkan sebanyak 4000 personel pasukan perdamaian ke Operasi Perdamaian PBB atau masuk ke dalam 10 besar negara yang mengirimkan pasukan perdamaian terbanyak. Dalam peta jalan ini, Kemlu berkomitmen untuk terus mensosialisasikan pentingnya partisipasi pasukan perdamaian perempuan dan mengoptimalkan kerjasama dengan International Association of Women Police (IAWP) untuk meningkatkan jumlah pasukan perdamaian perempuan.

Upaya Kemlu Indonesia tidak hanya sebatas di ranah domestik, namun juga regional. Menlu Retno terus mempromosikan agenda WPS dalam sejumlah pertemuan ASEAN dan mengingatkan betapa pentingnya peran perempuan dalam proses perdamaian. Selain itu, Indonesia telah menandatangani *Letter of Intent* dengan Belanda mengenai WPS pada Bulan Maret 2020 lalu. Dalam perjanjian ini, Indonesia dan Belanda bersama sama berkomitmen memperkuat kapasitas perempuan di bidang keamanan dan melakukan pelatihan bagi pasukan perdamaian serta mediator. Kedepannya, Kemlu terus berusaha merangkul negara lain untuk berkomitmen dan menghasilkan kerjasama mengenai upaya menaikkan jumlah pasukan perdamaian perempuan ini.

Upaya yang paling baru yang dilakukan Kemlu adalah menginisiasikan Resolusi DK PBB 2538 yang khusus membahas mengenai pasukan perdamaian perempuan. Resolusi ini berhasil diadopsi oleh DK PBB dengan dukungan dari 97 negara. Segala upaya kerjasama dan pembuatan resolusi yang dilakukan Indonesia ini, tidak terlepas dari aktivitas diplomasi Kemlu dengan negara lain. Indonesia berhasil mempersuasi negara lain untuk turut berkomitmen menaikkan jumlah pasukan perdamaian perempuan yang akan dikirimkan ke Operasi Perdamaian PBB.

Melalui penelitian penulis sesuai dengan tahun penelitian, upaya Kemlu telah membuahkan kesadaran kepada beberapa pihak mengenai pentingnya pasukan perdamaian perempuan dan untuk menaikkan jumlah partisipasi pasukan perdamaian perempuan merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mencapai

*sustained peace* di negara berkonflik. Sesuai data yang ada, terjadi peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan yang dikirimkan Indonesia ke Operasi Perdamaian PBB. Bahkan di tahun 2019 lalu, Indonesia berhasil mencapai jumlah pengiriman 100 pasukan perdamaian perempuan dan seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut naik sampai pada Agustus 2020 menjadi 157 personel. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditemukan tantangan dan peluang yang dihadapi Kemlu untuk menaikkan jumlah anggota pasukan perdamaian perempuan. Tantangan dan peluang ini pun dijadikan cara untuk menjadikan upaya yang akan dilakukan selanjutnya menjadi lebih efektif. Beberapa upaya tersebut, mengindikasikan bahwa dalam mencapai kepentingan nasionalnya yaitu perdamaian dunia, Indonesia melakukan salah instrumen untuk mencapainya, yaitu dengan menaikkan jumlah pasukan perdamaian perempuan yang berperan penting di Operasi Perdamaian PBB, yang terbukti cenderung naik setiap tahunnya dari tahun 2015-2020.

Peran pasukan perdamaian perempuan betul sangat penting demi mencapai operasi perdamaian yang lebih efektif dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Sehingga, upaya ini penting untuk terus dilanjutkan menjadi salah satu prioritas Kemlu sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam mencapai perdamaian dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Berridge, G.R. *Diplomacy Theory and Practice* (London: Palgrave MacMillan, 2010).
- Creswell, John C. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. California: SAGE Publications, 2009.
- Djelantik, Sukawarsini *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Fetherston, A.B. *Towards a Theory of United Nations Peacekeeping*. New York: St Martin's Press, 1994.
- Karim, Sabrina dan Kyle Beardsley. *Equal Opportunity Peacekeeping : Women, Peace, and Security in Post Conflict States*. New York: Oxford University Press, 2017.
- Runyan, Anne S. dan V. Spike Peterson, *Global Gender Issues in the New Millenium*. Colorado: Westview Press, 2014.
- Shepherd, Laura J. *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relation*. New York: Routledge, 2015.

### Jurnal

- Cornago, Noe. "Diplomacy." *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict*.
- Daly, Mary "Gender Mainstreaming in Theory and Practice." *Social Politics: International Studies in Gender, State, & Society* 12, No.3 (2005).
- Hutabarat, Leonard F. "Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB." *Jurnal Pertahanan* 6, No. 2 (2016).
- Hutabarat, Leonard F. "Indonesian Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission." *Jurnal Pertahanan* 3, No.3 (2017)
- Hutabarat, Leonard F. "Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities." *Jurnal Global & Strategis* 8, No. 2 (2014).



Neack, Laura. "UN Peace-Keeping: In the Interest of Community or Self?." *Journal of Peace Research* 32, No. 2 (1995).

Nuechterlein, Donald E. "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making." *British Journal of International Studies* 2, No.3 (1976).

Sarjoon, Athambawa dan M. Agus Yusoff. "The United Nations Peacekeeping Operations and Challenges." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 8, No. 3 (2019).

Thies, Cameron G. dan Angguntari C. Sari. "A Role Theory Approach to Middle Powers: Making Sense of Indonesia's Place in the International System." *Contemporary Southeast Asia* 40, No. 3 (2018).

Timur, Fitriani Bintang. "The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India, and the Philippines." *Global: Jurnal Politik Internasional* 18, No. 1 (2016).

#### Dokumen Negara

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017*, <https://backpanel.kemlu.go.id/Shared%20Documents/Permenlu%20No.%201%20Tahun%202017%20tentang%20Road%20Map%20Vision%204.000%20Peacekeepers%202015-2019.pdf>

Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, 19 Desember 2000, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf>

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

#### Website

Basu, Moni. "Indian women peacekeepers hailed in Liberia." *CNN*. 2 Maret 2010. <https://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/03/02/liberia.women/index.html> (diakses pada 11 Agustus 2020).

Hana, Oktaviano DB. "ASEAN Women Leaders' Summit, Indonesia Tekankan Perubahan Pola Pikir." *Bisnis.com*. 13 November 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201113/15/1317447/asean-women-leaders-summit-indonesia-tekankan-perubahan-pola-pikir> (diakses pada 7 Januari 2021).

Oktavianti, Tri Indah. "Women must play central role in battle against pandemic: Foreign Minister." *The Jakarta Post*. 7 Agustus 2017.

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/07/women-must-play-central-role-in-battle-against-pandemic-foreign-minister.html> (diakses pada 6 Januari 2021).

Timur, Fitri Bintang. "Politik Nasional: Tentang Perempuan dan Pertahanan." *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. 5 Oktober 2016. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1090-tentang-perempuan-dan-pertahanan> (diakses pada 17 September 2020).

"Gender." *United Nations Peacekeeping*. <https://peacekeeping.un.org/en/gender> (diakses pada 5 Oktober 2020).

"Indonesia and the United Nations Peacekeeping Mission." *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*. 29 Januari 2019. [https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission](https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission) (diakses pada 10 Desember 2020).

"Indonesia Calls for Women, Peace, and Security Networks in ASEAN." *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*. 3 November 2019. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/752/berita/indonesia-calls-for-women-peace-and-security-networks-in-asean> (diakses pada 12 Desember 2020).

"Indonesian Membership on the UN Security Council." *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*. [https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council](https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman_list_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council) (diakses pada 28 Agustus 2020 dan 14 Desember 2020).

"Indonesia's Non-Permanent Membership to the United Nations Security Council Period 2019-2020." *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*. 8 April 2019. [https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council](https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman_list_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council) (diakses pada 1 Desember 2020).

"Keanggotaan Indonesia pada DK PBB." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 8 April 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb) (diakses pada 6 Februari 2020).

"Landmark resolution on Women, Peace, and Security." *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women*. <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/> (diakses pada 7 Februari 2020).

"Menlu Retno dan Menteri Luar Negeri Belanda tandatangan Kerjasama Women, Peace, and Security." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 10 Maret 2020. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1115/berita/menlu-retno-dan-menteri-luar-negeri-belanda-tandatanganan-kerjasama-women-peace-and-security> (diakses pada 13 Desember 2020).

- “Military.” *United Nations Peacekeeping*. <https://peacekeeping.un.org/en/military> (diakses pada 6 Februari 2020).
- “Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi Raises Women Empowerment Issues in the UN Human Rights Council Session.” *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*. 25 Februari 2020. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1076/berita/minister-of-foreign-affairs-retno-marsudi-raises-women-empowerment-issues-in-the-un-human-rights-council-session> (diakses pada Januari 2021).
- “Pengarusutamaan Gender.” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 31 Maret 2019. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/45/tentang\\_kami/pengarusutamaan-gender](https://kemlu.go.id/portal/id/read/45/tentang_kami/pengarusutamaan-gender) (diakses pada 5 Desember 2020).
- “Pidato Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB tanggal 7 Mei 2019.” *The Jakarta Post*. 13 Mei 2019. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/05/13/blue-helmets-model-for-global-partnership.html> (diakses pada 14 November 2020).
- “Resolution 2538.” *United Nations Security Council*. <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2538> (diakses pada 12 Desember 2020).
- “Secretary General Ban Ki-moon Lecture at the Indonesia Peace and Security Centre.” *United Nations Secretary-General*. 20 Maret 2012. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2012-03-20/secretary-general-ban-ki-moon-lecture-indonesia-peace-and-security> (diakses pada 19 September 2020).
- “Statement by Retno L.P. Marsudi Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia at The United Nations Security Council Open Debate on Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping.” *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*. 28 Mei 2019. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/337/pidato/statement-by-retno-lp-marsudi-minister-for-foreign-affairs-republic-of-indonesia-at-the-united-nations-security-council-open-debate-on-investing-in-peace-improving-safety-and-performance-of-un-peacekeeping> (diakses pada 2 Desember 2020).
- “Summary Troops Contributing Countries by Ranking Police, UN Military Experts on Mission, Staff Officers and Troops.” [https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/2\\_country\\_ranking\\_15.pdf](https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/2_country_ranking_15.pdf) (diakses pada 12 Desember 2020).
- “The 2021 International Association of Women Police Conference.” *IAWP 2020 Yogyakarta Indonesia*. <https://www.iawp2020indonesia.org/> (diakses pada 11 Desember 2020).
- “The Crucial Role of Women as Agents of Peace, Tolerance, and Prosperity.” *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*. 29 Mei 2019. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/343/view/the-crucial-role-of-women-as-agents->

of-peace-tolerance-and-prosperity (diakses pada 29 Maret 2020, 14 November 2020, dan 3 Januari 2021).

“The first-ever Female Pakistani UN Peacekeeping team receives UN Medals.” *United Nations Peacekeeping*. 4 Februari 2020. <https://peacekeeping.un.org/en/first-ever-female-pakistani-un-peacekeeping-team-receives-un-medals> (diakses pada 19 September 2020).

“Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. 24 September 2018. [https://www.setneg.go.id/view/index/tim\\_koordinasi\\_misi\\_pemeliharaan\\_perdamaian\\_1](https://www.setneg.go.id/view/index/tim_koordinasi_misi_pemeliharaan_perdamaian_1) (diakses pada 25 Agustus 2020).

“Troop and Police Contributors.” *United Nations Peacekeeping*. <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors> (diakses pada 29 November 2020).

“UN Security Council Adopts Indonesia’s Resolution on Female Peacekeepers.” *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*. 29 Agustus 2020. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1632/berita/un-security-council-adopts-indonesias-resolution-on-female-peacekeepers> (diakses pada 12 Desember 2020).

“What is peacekeeping?” *United Nations Peacekeeping*. <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping> (diakses pada 3 Januari 2021).

“Women in Peacekeeping.” *United Nations Peacekeeping*. <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping> (diakses pada 7 Februari 2020 dan 10 Desember 2020).

### Sosial Media

Instagram @kipskemlu, “Peningkatan Peacekeeper Wanita,” diunggah pada 13 November 2020.